

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Di era reformasi ini, perkembangan teknologi dan ekonomi sangat pesat disetiap negara termasuk Indonesia, sehingga setiap negara membutuhkan pemerintah yang baik dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintah yang berkualitas berupa tatakelolah pemerintahan yang baik atau yang dikenal dengan *good governance*. Pemerintah yang baik merupakan suatu bentuk dari keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Susilawati & Dwi Seftihani (2014). Dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk dapat menunjukan tugas dan tanggungjawabnya secara transparan dan akuntabilitas pada setiap Alokasi Dana dan penggunaan sumber daya keuangan.laporan keuangan berdasarkan peraturan pemerintah No.71 tahun 2010,merupakan laporan berstruktur mengenai laporan posisi dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu pelaporan(Mulyanti et al.,2021).

Pemerintah daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh peraturan pemerintah dalam bentuk undang–undang dan peraturan pemerintah yang bersifat mengikat seluruh pemerintah daerah.Laporan keuangan pemerintah disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas pelaporan yang meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan laporan keuangan pemerintah daerah. Bastian (2010:336).

Laporan keuangan dibuat untuk menyajikan informasi yang memenuhi standar kualitas yang relevan, andal dan dapat dipercaya dan di bandingkan, yang termuat dalam posisi keuangan dan seluruh data transaksi yang diperoleh dalam suatu entitas pelaporan keuangan selama satu tahun anggaran pelaporan sehingga laporan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah tersebut agar dapat digunakan oleh beberapa pihak yang berkepentingan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan. dan oleh karena itu untuk mendapatkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang baik. laporan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintah dimasa yang akan datang (Pujanira dan Taman, 2017). Kualitas laporan berguna sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak yang berkepentingan. kualitas laporan keuangan dengan berbagai pengukurannya, umumnya digunakan dalam keputusan investasi, perjanjian kompetensi dan persyaratan hutang, (Wiranti, 2021).

Salah satu upaya yang di dilakukan oleh pemerintah dalam perbaikan untuk meningkatkan transparansi akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan menerbitkan praturan perundangan tentang pengelolaan keuangan daerah dengan menyempurnakan sistem akuntansi (Permengri No.39 Tahun 2007).Maka pengelolaan keuangan daerah pemerintah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (good government), pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel,yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan rangkaian dari semua prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mewujudkan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan computer (Permendagri No. 59 Tahun 2007). yang dimana sudah menyesuaikan standar akuntansi. Standar akuntansi pemerintah merupakan suatu standar penyusunan laporan keuangan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan disusun dan disajikan dengan menyesuaikan standar akuntansi pemerintah pada (PP No.71 Tahun, 2010). yaitu pemerintah harus bisa menyajikan laporan keuangan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dapat dilihat dari pemeriksaan atas laporan keuangan yang disajikan oleh BPK dalam rangka memberikan pendapat atau opini atas konsisten pemerintah dalam perbaikan terhadap kualitas pertanggungjawaban keuangan Negara (Ratifah, 2012 :30).

Untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sistem akuntansi dibutuhkan komitmen organisasi dari setiap individu yang terlibat dalam penyusunan dan pengelolaan laporan keuangan yang ikut serta dalam menentukan hasil yang didapat. sehingga adanya rasa tanggung jawab dan persepsi dalam menjalankan konstruksi untuk mencapai tujuan organisasi.(Septarini,206).

Bentuk laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah selama satu periode anggaran adalah laporan keuangan pemerintah daerah.laporan ini digunakan untuk membandingkan realisasi, belanja, transfer dan pembiayaan

dengan anggaran yang ditentukan, sehingga bisa menilai pembatasan keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi sesuai substansi pelaporan dan perundang-undangan (Shihombing, 2011:4) pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan dalam rangka melakukan pendapat/ opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan (Ratifah, 2012:30). Menurut peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 informasi dalam laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas jika informasi tersebut memenuhi kualifikasi dalam akuntansi pemerintahan yaitu, relevan, andal, dan dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Aaditya Sanjaya (2017) dalam penelitiannya, penerapan standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah SKPD Kabupaten Kampar. Yang dimana semakin baik penerapan standar akuntansi pemerintah dalam proses dan pencatatan keuangan maka akan semakin baik juga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini didukung oleh (Nugraheni & Subaweh, 2011) yang di review oleh biro Inspeksi Kementerian Pendidikan (Komarudin, 2013), yang menemukan bahwa standar akuntansi pemerintah memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam hal ini badan pemeriksa keuangan banyak menemukan kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan. (Hanafi, 2013) dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan maka diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. (peraturan pemerintah nomor 56 Tahun, 2005). Sistem informasi keuangan daerah pemerintah daerah diwajibkan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi agar dapat meningkatkan kemampuan dalam

mengolah keuangan daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemda.

Berdasarkan data yang diunggah oleh Humas Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Nusa Tenggara Timur pada halaman website badan pemeriksa keuangan (BPK) Nusa Tenggara Timur (<https://kupang.bpk.go.id>), ditemukan bahwa sejak tahun 2019 sampai 2021, laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Kabupaten Manggarai Timur selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, yang berarti bahwa nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Manggarai Timur mendapatkan nilai opini WTP. WTP merupakan penilaian profesional pemeriksaan atas kewajaran informasi yang terdapat didalam laporan keuangan bukan jaminan bahwa laporan keuangan tersebut telah bebas dari kecurangan. Maka dari itu diharapkan dengan adanya hasil audit BPK selama kurang lebih 3 tahun mempertahankan predikat WTP nya dan diharapkan mampu menjadi contoh bagi daerah lain. Meski demikian ada juga catatan yang disampaikan BPK-RI Perwakilan Provinsi NTT atas LKPD Tahun 2021 Pemda Manggarai Timur belum sepenuhnya tertib dalam penatausahaan kas dan pengelolaan aset.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yensi (2014) dan Pujanira (2017) ditemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap LKPD Provinsi DIY. Tetapi penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kartopawiro dan Susanto (2018)

menemukan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten Musi Rawas. Maka dari itu peneliti ingin mengkaji lebih dalam mengenai pengaruh penerapan system akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipemda Manggarai Timur. selain itu peneliti ingin mengetahui apakah pemerintah kabupaten manggarai timur telah memenuhi indikator – indikator dari sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah yang telah diatur dalam perundang-undangan .Selain itu,perbedaan hasil penelitian antara penelti - peneliti terdahulu juga menjadi suatu hal yang harus dikaji lebih lanjut terkait pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian ini dari penelitian sebelumnya pada Pemda Manggarai Timur. Alasan pemilihan tempat yaitu karena merupakan salah satu pemerintah daerah yang mengalami kenaikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada tahun 2019-2021 atas laporan keuangan yang dihasilkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

1.2. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti termotivasi melakukan penelitian mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Manggarai Timur

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah, maka peneliti merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada badan keuangan daerah kabupaten manggarai timur?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan persoalan penelitian diatas maka, tujuan dilakukanya penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah Terhadap kualitas laporan keuangan pada badan keuangan daerah di Kabupaten Manggarai Timur

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat akademis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pemahaman tentang teori yang berhubungan dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu di UKAW.

b. Manfaat praktis

Bagi pemerintah badan keuangan Kabupaten Manggarai Timur, di harapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menjadi suatu bahan referensi dalam meningkatkan sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan terutama dalam proses pengelolaan laporan keuangan.